

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PERJUANGAN UMMAT  
TERHADAP RANCANGAN QANUN:**

- 1. TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
- 2. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN**
- 3. TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA HASIL  
MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS**

**DISAMPAIKAN OLEH  
Dr. NASRUL MUSADIR ALSA  
PADA SIDANG PARIPURNA KE - 7 MASA PERSIDANGAN VI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
TANGGAL 17 Januari 2008**

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Syukur Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bersama-sama menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh guna mengikuti dan mendengarkan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPR Aceh berkenaan dengan rencana pengesahan beberapa Qanun.

Shalawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke haribaan Panglima Revolusi Islam, Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian

**Yang kami hormati,**

Pimpinan DPR Aceh beserta seluruh Anggota DPR Aceh

Sdr. Gubernur Aceh

Sdr. Wakil Gubernur

Sdr. Sekretaris Daerah

Sdr-Sdr para kepala dinas, badan dan lembaga daerah

Sdr. Sekretaris Dewan dan para staf

Rekan-rekan wartawan baik media cetak dan elektronik

Hadirin-hadirat yang berbahagia.

Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pansus XI dan Komisi C DPR Aceh yang telah memberikan sumbangsih dan pemikiran, serta kerja keras yang luar biasa dalam menyelesaikan proses qanun yang sangat penting yaitu qanun pengelolaan keuangan dan penyediaan dan pengelolaan dana cadangan serta penggunaan dana otonomi khusus.

Beberapa rancangan qanun yang akan kita sahkan pada hari ini mempunyai makna yang sangat penting dan menjadi titik yang menentukan bagi kita semua untuk pembangunan Aceh. Qanun-qanun ini nantinya akan menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan dan menggunakan untuk pembangunan Aceh khususnya dan Otonomi khusus, menyangkut dana cadangan Qanun ini seyogyanya akan mengikat kita semua dalam proses anggaran selanjutnya bagi pembangunan Aceh di masa mendatang.

Proses perjalanan rancangan Qanun ini juga menarik perhatian kita semua; dikarenakan terjadinya perdebatan yang panjang antara kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi; Proses penyelesaian Qanun yang berlangsung di DPR Aceh pun sempat tertunda karena menunggu adanya kesepakatan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan ditandatanganinya perjanjian kesepakatan antara pemerintah/kabupaten kota dengan pemerintah provinsi. Untuk itu fraksi kami, Fraksi Perjuangan Ummat menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas model penyelesaian seperti ini.

---

---

## **Sidang Dewan Yth,**

Sebelum kami sampai kesimpulan akhir tentang beberapa rancangan Qanun pada hari ini, Fraksi kami, Fraksi perjuangan Ummat berkeinginan untuk menyampaikan banyak hal berkaitan dengan perkembangan dan beberapa usulan mengenai pembangunan Aceh ke depan.

Fraksi kami, Fraksi Perjuangan Ummat melihat banyak hal yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari kita semua dalam kerangka konsep pembangunan Aceh di masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal-hal tersebut antara lain :

### **1. Beasiswa Bagi Anak Yatim Korban Konflik**

Konflik yang berkepanjangan di Provinsi NAD telah meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian rakyat aceh. Ratusan ribu korban konflik sampai hari ini masih hidup dalam sebuah bayang-bayang ketidakpastian, baik itu dari segi peningkatan kesejahteraan maupun ketersediaan kebutuhan dasar hidup. Fraksi

---

---

kami, Fraksi Perjuangan Ummat sangat mendukung adanya kebijakan dari eksekutif untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim korban konflik, karena sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yatim piatu dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pada kesempatan yang mulia ini, kami kembali mengingatkan eksekutif untuk memberikan perhatian penuh terhadap kebijakan ini. Kami menyadari begitu banyaknya persoalan yang dihadapi oleh eksekutif menyangkut pembangunan Nanggroe Aceh pasca konflik dan bencana gelombang tsunami, namun kami juga merasa prihatin atas keterlambatan pihak eksekutif menyiapkan data-data pendukung sebagai syarat pemberian bantuan tersebut. Dari berbagai persoalan yang begitu banyak, kami berpendapat bahwa persoalan bantuan bagi anak yatim harus menjadi prioritas karena masyarakat dan terutama korban sudah sangat menantikannya, disamping itu hal ini juga menyangkut dengan masa depan generasi Aceh di masa yang akan datang. Tentunya kita berharap, dengan lahirnya UUPA dan ketersediaan dana yang begitu besar sudah

---

---

sepantasnya apabila anak-anak Aceh mendapat berbagai kemudahan dan fasilitas bagi pengembangan dirinya menjadi insan-insan yang terampil dan berpendidikan.

Fraksi kami, Fraksi Perjuangan Ummat juga memandang bahwa kebijakan pemberian bantuan kepada 100.000 anak-anak yatim merupakan bagian penting dalam proses reintegrasi, dengan penanganan yang tepat kebijakan ini akan memberi dampak psikologis yang signifikan terhadap korban konflik, kami yakin semua masyarakat Aceh dapat memahami walaupun bantuan tersebut jumlahnya terbatas, ini merupakan sebuah bukti perhatian dan kepedulian kita menyangkut masa depan mereka. Maka sudah seharusnya pihak eksekutif mengupayakan agar bantuan tersebut dapat sesegera mungkin dilaksanakan.

## **2. Masalah di Perbatasan**

### **Sidang Dewan Yth,**

Sudah berulang kali pihak DPR Aceh baik itu melalui pemandangan umum, pendapat usul saran komisi dan pendapat

---

---

akhir fraksi menyampaikan tentang perlunya terus dipantau bahaya laten yang timbul di daerah perbatasan kita; terutama menyangkut masalah aqidah. Kita perlu terus memantau dan mewaspadaai adanya pihak-pihak yang menyebarkan agama kepada penduduk kita yang selama ini sudah beragama islam di daerah perbatasan, terutama Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Tamiang Aceh Tamiang. Oleh karenanya kami mengharapkan pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menghadapi hal ini; antara lain memperbanyak jumlah dai perbatasan seiring dengan peningkatan fasilitasnya, pendirian pesantren-pesantren yang bermutu dan diiringi dengan memaksimalkan pemberdayaan pesantren yang telah ada. Menyangkut permasalahan ini kami sungguh-sungguh sangat mengharapkan langkah-langkah yang jitu dari pemerintah Aceh.

### **3. Masalah aset daerah**

#### **Sidang Dewan Yth,**

Berkali-kali juga dalam sidang paripurna ini, dewan mengingatkan pemerintah Aceh tentang aset daerah yang masih simpang siur. Dewan periode ini, sejak dari Plt. Gubernur Ir. Azwar Abubakar, Pj. Gubernur Mustafa Abubakar dan juga gubernur Irwandi Yusuf, dewan telah menekankan pentingnya di data kembali aset daerah yang memang benar-benar menjadi milik daerah.

Sekedar mengingatkan kita semua, bahwa pada masa tanggap darurat pasca tsunami, pemerintah Aceh banyak sekali menerima bantuan dari pihak luar, apakah itu dari pihak asing dan juga pemerintah pusat, baik itu barang bergerak dan lain sebagainya. Fraksi kami, fraksi Perjuangan Ummat sangat mengharapkan bahwa seluruh aset yang berupa bantuan pasca tsunami benar-benar telah terdata dengan baik dan menjadi milik pemerintah Aceh. Jika memang masih ada yang berada di pihak ketiga –yang tidak berhak memilikinya- maka kami sungguh sangat berharap agar pemerintah Aceh segera melakukan upaya-upaya mengembalikan aset tersebut

---

---

sesuai dengan ketentuan dan sah menjadi milik pemerintah Aceh dan terdata sebagai barang inventaris.

Begitu juga dengan aset berupa barang tidak bergerak, baik tanah maupun rumah agar juga segera ditertibkan dan dengan jelas terdata sebagai milik pemerintah Aceh. Rumah-rumah dinas yang masih ditempati oleh yang tidak berhak menempatinya agar segera dikembalikan ke daerah dan diberikan kepada yang lebih berhak menempatinya.

Demikian juga tanah-tanah yang jelas-jelas merupakan milik pemerintah Aceh agar segera diperjelas statusnya. Jangan sampai ada pihak ketiga yang hanya bermodal selembor papan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Fraksi kami, fraksi perjuangan ummat mengharapkan adanya upaya-upaya serius dari pemerintah Aceh untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Kami mengkhawatirkan jika masalah seperti ini dibiarkan terus, mungkin saja suatu saat nanti kantor DPR Aceh dan juga kantor gubernur Aceh akan diklaim sebagai milik pihak lain.

**Sidang Dewan Yth,**

Pada kesempatan ini kami juga perlu menyampaikan masalah yang menyangkut ibukota Provinsi Aceh.

**Sidang Dewan Yth,**

Banda Aceh semua kita yang telah hadir dan yang berhalangan hadir maupun yang berada disekitarnya, tentang keberadaan Kota Banda Aceh adalah ibukota Provinsi Aceh. Sejak dahulu sampai sekarang ini kita lihat semakin padat dan semrawut. Di satu sisi kita mensyukuri hal ini sebagai salah satu ukuran adanya peningkatan ekonomi semakin baik. Namun disisi lain kita juga harus mengamati sisi keindahan suatu ibukota provinsi dan disisi lain kita juga perlu memikirkan adanya perluasan ibukota provinsi demi menciptakan tempat pertumbuhan ekonomi yang baru. Seiring dengan banyaknya rencana-rencana pengembangan ke depan, baik itu berupa rencana jangka panjang maupun jangka pendek, baik program pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, maka dengan sendirinya ibukota provinsi pun akan memainkan

---

---

peran sebagai pusat pengembangan ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan juga pariwisata.

Sementara kita melihat kondisi Banda Aceh hari ini sebagai ibukota provinsi Aceh semakin sempit dan hampir tiada peluang untuk dilakukan pengembangan. Oleh sebab itu kiranya pihak pemerintah provinsi melakukan pendekatan dengan pemerintah kabupaten Aceh Besar dalam kerangka pengembangan ibukota provinsi.

Jika memang pendekatan itu tidak memungkinkan; maka tidak tertutup kemungkinan yang telah disampaikan Abu Yus Mantan Ketua DPRD NAD ibukota provinsi Aceh untuk dipindahkan ke tempat lain.

### **Sidang Dewan Yth,**

Dalam kesempatan ini, Fraksi kami, Fraksi Perjuangan Ummat mengusulkan bahwa ada baiknya nama Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh dikembalikan menjadi KUTARAJA. Usulan kami ini berangkat dari nilai historis masa lalu yang sungguh heroik dan

---

---

mempunyai makna yang sangat mendalam. Kalau Makassar bisa kenapa kita tidak!

#### **4. Kenyamanan Investasi**

Road show Pemerintah Aceh telah berhasil memperoleh ratusan MoU dengan pihak investor, ini merupakan hal yang menggembirakan mengingat besarnya kekayaan sumber daya alam yang dikandung Bumi Iskandar Muda ini. Yang menjadi persoalan adalah hingga saat ini belum terdapat sebuah kemajuan yang dicapai dari MoU tersebut, laju investasi di Aceh belum memperlihatkan trend yang menanjak. Sebagaimana harapan masyarakat Aceh besar pula harapan kami kepada pihak eksekutif untuk mencari solusi terhadap percepatan implementasi sebagaimana yang tertuang dalam berbagai MoU yang telah ditandatangani. Hal ini kami pandang perlu mengingat "*booming*" pengangguran yang bakal terjadi seiring berakhirnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemahaman kami, MoU bukanlah sebuah ukuran terhadap proyeksi pembangunan yang akan dicapai, namun hanyalah sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah nota, jangan sampai kita lalai dengan pertimbangan-pertimbangan kesepakatan yang telah dibangun dengan pihak ketiga sehingga mengecilkan minat dan niat pihak ketiga lainnya untuk berinvestasi di nanggroe yang kita cintai ini. Sudah saatnya Pemerintah Aceh menagih implementasi MoU yang telah dibuat, sekaligus memberikan batas waktu yang dimungkinkan untuk menunggu kepastian pelaksanaan dari pihak ketiga.

### **Sidang Dewan Yth,**

Hal lain yang kami pandang perlu adalah masalah kenyamanan investor dalam melakukan investasi, bahwa persoalan yang saat ini sedang terjadi adalah tuntutan masyarakat di dua Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar dan beberapa daerah lainnya. Pemerintah Aceh harus dapat menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa dan harus sesegera mungkin dicapai sebuah win-win

---

---

solution yang mampu mengakomodir keinginan pihak yang bertikai, jangan sampai hal ini berlarut-larut dan menjadi preseden yang buruk terhadap iklim investasi di Nanggroe Aceh Darussalam. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi kontradiksi dengan kebijakan untuk meningkatkan investasi di Aceh. Untuk itu Fraksi kami, Fraksi Perjuangan Ummat mengharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan upaya-upaya konkrit dan terarah dalam menyelesaikan kasus-kasus sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas. Perlu juga kami ingatkan bahwa persoalan ini mempunyai korelasi yang kuat terhadap kelangsungan hidup benih perdamaian yang telah kita semai.

**Sidang Dewan Yth,**

Sejalan dengan begitu banyaknya MoU yang telah ditandatangani dengan harapan terwujud dalam *action plan* di lapangan, maka hal yang tidak kalahnya untuk segera mendapat perhatian adalah masalah ketersediaan pasokan listrik. Hendaknya hal ini menjadi prioritas utama pemerintah Aceh tahun ini. Alangkah

---

---

naifnya jika sebuah investasi gagal hanya dikarenakan tidak cukupnya listrik.

Oleh karenanya, sambil menunggu penyelesaian PLTA Peusangan, maka seyogyanya pemerintah Aceh segera mencari alternatif –alternatif baru dan melepaskan ketergantungan listrik dari sumber di luar Aceh.

**Sidang Dewan Yth,**

Kesempatan ini kami ingin menyampaikan pemikiran di sektor kesehatan. Sesuai dengan amanat UU PA dan visi-misi gubernur, maka sektor ini seyogyanya mendapat perhatian lebih. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam beberapa kesempatan terdahulu dalam sidang paripurna dewan ini, ada beberapa hal yang mesti mendapatkan perbaikan di sektor ini; antara lain :

- perlunya perhatian untuk membenahi akses kesehatan ke desa-desa; dalam hal ini penempatan bidan desa perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya dan kemudahan fasilitas lainnya. Selama ini banyak bidan desa yang justru tidak bersedia tinggal didesa.

Terhadap hal ini tidak bisa kita salahkan dikarenakan tidak memadainya tempat tinggal para bidan desa tersebut.

- Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan tenaga medis, baik dokter, dokter gigi, perawat, tenaga psikologi, dan juga tenaga administrasi di Puskesmas, disamping hal yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan berbagai alat-alat kesehatan/fasilitas penunjang sesuai dengan status puskesmas
- Kemudian peningkatan status rumah sakit kabupaten yang tentunya diiringi dengan tercukupinya berbagai sarana kesehatan sesuai dengan tipe rumah sakitnya, termasuk juga ketersediaan para dokter spesialis –paling tidak untuk ukuran 5(lima) bidang besar.
- Dan yang paling utama dari semua itu, adalah membenahi Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin. Ada tiga hal yang mesti dibenahi dari RSUD ZA yaitu, pembenahan manajemen. Selama ini banyak orang-orang dan berpikiran cemerlang yang ada di RSUD ZA, namun tertutupi oleh beberapa orang yang mempunyai itikad tidak baik. Oleh karenanya dalam hal ini Fraksi kami sangat

mengharapkan Sdr. Gubernur untuk memilih orang-orang baik yang berpikiran cemerlang untuk ditempatkan di RSUD ZA. Yang kedua yang mesti dibenahi di RSUD ZA adalah faktor disiplin dan karakter. Banyaknya tenaga medis yang tidak berada di tempat dan juga meninggalkan tempat pada saat jam kerja seharusnya tidak terjadi di sebuah pelayanan seperti rumah sakit. Disamping juga faktor karakter para tenaga medis itu sendiri yang mesti betul-betul harus dirubah sebagaimana idealnya karakter dokter dan perawat.

- Yang ketiga adalah penyempurnaan fasilitas. Sebagai sebuah rumah sakit rujukan provinsi dan juga rumah sakit pendidikan, maka fasilitas yang tersedia di RSUD ZA juga seharusnya sudah lengkap. Alat-alat kesehatan canggih seperti CT-Scan 64 slice dan alat-alat radiotherapi semestinya sudah dipunyai oleh RSUD ZA. Karenanya fraksi kami berharap agar hal ini bisa dianggarkan dalam anggaran tahun 2008.
- Kita ketahui RSUD Dr.Zainoel Abidin merupakan rumah sakit rujukan provinsi, disamping itu juga merupakan rumah sakit

pendidikan yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran Unsyiah untuk mendidik para calon dokter , dokter spesialis dan perawat. Oleh karenanya membenahi rumah sakit Dr. Zainoel Abidin tidaklah semata-mata dilihat dari sisi pelayanan kesehatannya, namun juga mesti dilihat dari sisi pendidikan medis yang tentunya tidak ternilai. Dan karenanya berbicara mengenai pendidikan di RSUD ZA semestinya juga harus melihat fakultas kedokteran Unsyiah.

Di samping hal-hal yang kami sampaikan diatas berkenaan dengan pembenahan RSUD ZA, maka perhatian juga mesti diberikan kepada fakultas kedokteran Unsyiah. Pengiriman tenaga dokter untuk menempuh jenjang spesialis dan sub-spesialis haruslah mendapat dukungan penuh dari pemerintah Aceh, disamping juga terus membenahi program pendidikan dokter spesialis yang ada di Unsyiah.

**Sidang Dewan Yth,**

Berkenaan dengan tekad dan niat gubernur untuk membangun Aceh secara besar-besaran, maka program utama yang harus dilakukan adalah menembus keterisoliran daerah-daerah terpencil. Karenanya pembangunan jalan utama yang menghubungkan Aceh bagian selatan dan tenggara mestinya menjadi prioritas. Lima kabupaten di bagian itu yaitu Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Singkil seyogyanya sudah terhubung melalui jalan utama. Jika kelima kabupaten ini bisa tembus melalui sebuah jaring-laba-laba, maka kita berkeyakinan geliat perekonomian melalui sektor pertanian dan perkebunan juga akan melonjak.

**Sidang Dewan Yth,**

Berkenaan dengan hasil pembahasan pansus XI dan Komisi C berkaitan dengan beberapa Qanun yang akan kita sahkan pada hari ini, Fraksi kami tidak mempunyai pendapat lain, sebagaimana juga bahwa di Pansus XI dan Komisi C fraksi kami mempunyai

---

---

keterwakilan yang senantiasa berkonsultasi mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi selama proses pembahasan.

Meskipun begitu, terhadap penyampaian gubernur pada sidang paripurna terdahulu, fraksi kami, fraksi perjuangan ummat mempunyai pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap jawaban gubernur mengenai penghapusan pasal 34 ayat (2) kami tidak sependapat. Terhadap pasal ini kami sependapat dengan Pansus XI
2. Kemudian terhadap Pasal 53 yang mengatur tentang honorarium yang menurut gubernur agar ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dari pasal ini dihapuskan, kami tidak sependapat. Terhadap hal ini kami sependapat dengan Komisi C dan Pansus XI.
3. Terhadap usulan gubernur agar kalimat “ setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRA dengan terlebih dahulu mendapat

pertimbangan komisi terkait” yang menurut gubernur cukup ditambah kalimat “dan dilaporkan kepada pimpinan DPRA”, kami berpendapat bahwa sebaiknya cukup dengan kalimat **“setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRA”**

4. Demikian juga dengan kalimat “dan telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan DPRK” dan menurut gubernur diganti dengan kalimat “setelah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRK”, maka kami berpendapat cukup ditambah kalimat **“setelah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRK”**

Fraksi kami juga menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Gubernur yang telah menyetujui penambahan BAB VI baru yang mengatur tentang Pengawasan dan Evaluasi oleh DPRA

**Sidang Dewan Yth,**

Jika apa yang telah kami sampaikan diatas berkenaan dengan materi qanun tersebut telah terpenuhi, maka fraksi kami tidak keberatan untuk ditetapkan menjadi qanun.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi perjuangan Ummat, semoga apa yang kami sampaikan ini mempunyai makna yang mendalam bagi kita semua. Kami menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini.

Terima kasih.

**Billahitaufiq Walhidayah**

**Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.**